



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : POERNOMO PUSPO SUSILO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR
3. NHK : 210095

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.245.186.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 476 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.407.592.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 837.594.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 584.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
6. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 228.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.545.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 367.106.660

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.255.837.660

**III. HUTANG**

Rp. 89.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.166.837.660

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.